



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112  
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233

Pangkalan Bun, 3 Januari 2025

Nomor : 900/~~209~~/III/BKAD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permintaan Data Belanja Melalui  
Mekanisme GU / TUP T.A. 2025

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kab.Kotawaringin Barat  
di -

Tempat

Menindaklanjuti tahapan dalam persiapan implementasi Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah, serta untuk menunjang pelaksanaan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Pemerintah Kabupaten harus menentukan besaran UP (Uang Persediaan) Tunai dan KKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berkenaan dengan hal ini, diminta kepada seluruh SKPD untuk menyampaikan data sebagai berikut :

1. Belanja yang akan diserap melalui mekanisme GU (ganti uang) dan TUP (tambahan uang persediaan) selama tahun 2025 (sebagaimana format terlampir).
2. Belanja GU / TUP yang disampaikan merupakan belanja selain dari sumber dana yang bersifat khusus dan harus melalui mekanisme LS untuk mempermudah pelaporan penyerapannya seperti belanja Perjalanan Dinas menggunakan sumber dana DAK Fisik / Non Fisik dan DID agar tidak diajukan melalui GU.
3. Belanja tagihan rutin kantor, seperti belanja Listrik, Air, Telepon / Internet serta JKK JKM Non ASN dapat dibayarkan melalui GU.
4. Belanja Perjalanan Dinas, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Catering, maupun Belanja Modal Non Kontraktual dapat dibayarkan melalui KKPD.
5. Belanja GU / TUP diluar dari jenis – jenis belanja GU / TUP sebagaimana disebutkan pada lampiran, harus dikoordinasikan pada Bidang Perbendaharaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya hal ini dalam rangka menetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD, dimohon agar data belanja GU/TUP ini dapat diinput paling lambat tanggal **8 Januari 2025 jam 16.00 WIB** melalui *link* <https://s.id/formulasiUP2025> dan menyampaikan *print out* bertanda tangan Pengguna Anggaran kepada Kepala BKAD selaku BUD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran : Surat Bendahara Umum Daerah  
 Nomor : 900/20.9/III/BKAD/2025  
 Tanggal : 3 Januari 2025

**Belanja yang akan diserap melalui mekanisme GU (ganti uang) dan  
 TUP (tambahan uang persediaan) Tahun Anggaran 2025 :**

Kode & Nama SKPD :

No	Kode Sub Rekening Belanja	Uraian Sub Rekening Belanja	Nilai Pagu (Rp)	Keterangan
1	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	—	
2	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000	
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.398.600	
4	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	—	
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	422.818.000	
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	—	
7	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.128.000	
8	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	—	
9	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.375.000	
10	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.330.000	
11	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	—	
12	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	—	
13	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.438.800	
14	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	337.440	
15	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	421.800	
16	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.277.360	
17	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.907.500	
18	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	71.415.000	
19	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	
20	5.1.02.01.01.0058	Bel. makanan dan minuman aktivitas lapangan	28.800.000	Keg. dilaksanakan di luar Rp. 912.027.440. (di luar kota)
<b>Jumlah (Rp)</b>			xxxxxxxx	Icab. ktw. Barat

Keterangan :

\* Belanja lain yang dibutuhkan dan harus di koordinasikan dengan bidang Perbendaharaan.

